

## **Analisis Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari**

### ***Analysis of Comparative and Competitive Advantage of Smallholder Oil Palm Farming in Mersam Subdistrict, Batanghari Regency***

**Sherly Monica Ardelia<sup>1</sup>, Saidin Nainggolan<sup>2</sup>, dan Yanuar Fitri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Jambi

<sup>2</sup> Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Jambi Email :

[Sherlymonicaardelia@gmail.com](mailto:Sherlymonicaardelia@gmail.com)

Published: January , 2026

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komparatif dan kompetitif usahatani kelapa sawit rakyat serta dampak kebijakan pemerintah di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 menggunakan metode survei terhadap 43 petani kelapa sawit yang dipilih secara *purposive* di Desa Sengkati Mudo dan Desa Simpang Rantau Gedang. Analisis data dilakukan dengan metode Policy Analysis Matrix (PAM) untuk mengukur keuntungan privat, keuntungan sosial, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, serta dampak kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit rakyat menguntungkan dengan keuntungan privat sebesar Rp22.104.134,46/ha dan keuntungan sosial sebesar Rp11.010.442,12/ha. Nilai PCR sebesar 0,69 dan DRCR sebesar 0,82, nilai yang lebih kecil daripada satu, menunjukkan adanya keunggulan kompetitif dan komparatif. Hasil uji one sample test menunjukkan bahwa secara signifikan kelapa sawit mempunyai daya saing baik dari aspek indikator daya saing PCR dan DRCR. Dari sisi kebijakan, pemerintah memberikan perlindungan terhadap output, yang ditunjukkan oleh nilai NPCO dan EPC sebesar 1,18. Namun, pada sisi input, petani masih menghadapi harga input tradable yang lebih tinggi dibandingkan harga sosial, tercermin dari nilai NPCI sebesar 1,16. Secara keseluruhan, usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam memiliki daya saing yang baik dan layak dikembangkan dengan memperhatikan efisiensi input serta kebijakan yang lebih mendukung petani.

**Kata kunci:** kelapa sawit, daya saing, PAM, PCR, DRCR, kebijakan pemerintah

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the comparative and competitive advantages of smallholder oil palm farming and the impact of government policies in Mersam Subdistrict, Batanghari Regency. The research was conducted in 2024 using a survey method involving 43 smallholder oil palm farmers selected purposively in Sengkati Mudo Village and Simpang Rantau Gedang Village. Data analysis was carried out using the Policy Analysis Matrix (PAM) method to measure private profits, social profits, comparative advantage, competitive advantage, and the impact of government policies. The results show that smallholder oil palm farming is profitable, with private profits of IDR 22,104,134.46 per hectare and social profits of IDR 11,010,442.12 per hectare. The PCR value of 0.69 and the DRCR value of 0.82, both of which are less than one, indicate the existence of competitive and comparative advantages. The one-sample test results show that oil palm farming has a statistically significant level of competitiveness based on the PCR and DRCR indicators. From a policy perspective, the government provides protection for output, as indicated by NPCO and EPC values of 1.18. However, on the input side, farmers still face tradable input prices that are higher than their social prices, as reflected by an NPCI value of 1.16. Overall, smallholder oil palm farming in Mersam Subdistrict has good competitiveness and is feasible to be developed, provided that input efficiency is improved and more supportive policies are implemented.*

**Keywords:** palm oil, competitiveness, PAM, PCR, DRCR, government policy

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

## **PENDAHULUAN**

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan, lapangan kerja, dan penggerak kegiatan ekonomi di perdesaan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sektor pertanian pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 13,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memiliki ketahanan dan peran penting dalam menopang perekonomian nasional, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Salah satu subsektor pertanian yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional adalah subsektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang berperan penting sebagai sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan bagi petani. Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit kedua setelah Malaysia (Sulardi, 2022). Selain diusahakan oleh perkebunan besar, kelapa sawit juga banyak diusahakan oleh petani rakyat dengan skala usaha relatif kecil hingga menengah. Usahatani kelapa sawit rakyat memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di daerah sentra produksi. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena daya guna menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) yang diperlukan sebagai bahan baku industri. Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah lebih dari 50% kebutuhan kelapa sawit dunia yang dapat dipenuhi oleh Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara penghasil dan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. (FOA, 2017) dalam (Abdul, 2023).

Volume dan nilai ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) tahun 2021 sebesar 2.543.057 ton dan pada tahun 2022 sebesar 3.455.677 ton. Tingginya tingkat ekspor komoditas kelapa sawit dari Indonesia ke pasar internasional telah menjadikan kelapa sawit sebagai pusat perhatian dalam sektor pertanian nasional.

Kabupaten Batanghari, khususnya Kecamatan Mersam, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan kelapa sawit rakyat dengan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 26.938,17 ha dan produksi kelapa sawit sebesar 80.005,17 ton serta produktivitas sebesar 2,96 ton/ha. Sebagian besar petani di wilayah ini menggantungkan sumber pendapatannya pada usahatani kelapa sawit. Namun demikian, keberlanjutan usahatani kelapa sawit rakyat sangat dipengaruhi oleh kemampuan petani dalam menghadapi dinamika harga input dan output, tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi, serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor perkebunan kelapa sawit.

Upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani kelapa sawit rakyat sangat erat kaitannya dengan tingkat daya saing usahatani. Daya saing tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga input dan output, penggunaan input tradable dan non-tradable, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan subsidi, proteksi, dan penetapan harga. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pertanian, seperti efisiensi dan biaya kesempatan, berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Kolombo et al., 2025). Kebijakan yang kurang berpihak, seperti tingginya harga input pupuk dan pestisida akibat keterbatasan subsidi, dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing usahatani kelapa sawit rakyat. Di sisi lain, fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani juga berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan petani. Perubahan harga input dan output yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah akan memengaruhi keputusan produksi petani, tingkat biaya usahatani, serta keuntungan yang diperoleh, sehingga berdampak pada daya saing komoditas pertanian (Nainggolan et al., 2024).

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk mengkaji tingkat daya saing usahatani kelapa sawit rakyat baik secara kompetitif maupun komparatif, serta untuk menilai dampak kebijakan pemerintah terhadap kinerja usahatani tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM), yang mampu mengukur efisiensi ekonomi, keunggulan daya saing, serta pengaruh kebijakan input dan output terhadap usahatani kelapa sawit rakyat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi daya saing kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan perkebunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis daya saing kelapa sawit rakyat yang dikaitkan secara langsung dengan kebijakan input dan output yang terkait serta pengujian sensitivitas terhadap perubahan harga yang relevan dengan kondisi pasar aktual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari dengan fokus penelitian di Desa Sengkati Mudo dan Desa Simpang Rantau Gedang. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), dengan dasar pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang sebagai penghasil kelapa sawit di Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari petani usahatani kelapa sawit rakyat dengan sistem wawancara langsung yang dipandu dengan daftar pertanyaan (*kuesioner*) dan observasi. Data primer melalui observasi diperoleh dengan melakukan pengamatan dan peninjauan langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan daftar-daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu kepada responden yaitu pemilik usahatani kelapa sawit rakyat lebih lanjut lagi. Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti (Abubakar, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis daya saing dengan pendekatan *Policy Analysis Matrix* yang dapat mengukur keunggulan komparatif (DRCR) dan keunggulan kompetitif (PCR) yang mengacu kepada Pearson et al. (2005), dan Monkey (2005). Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pada variabel-variabel tertentu, seperti harga input dan output yang dapat mempengaruhi tingkat daya saing usahatani yang diukur melalui nilai PCR dan DRCR. Analisis ini dilakukan dengan mensimulasikan perubahan pada variabel-variabel khususnya harga input produksi dan harga output. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perubahan variabel tersebut mempengaruhi nilai PCR dan DRCR sebagai indikator keunggulan kompetitif dan komparatif (Anwar, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biaya Input Tradable dan Non Tradable

Biaya *input tradable* dan *non tradable* pada usahatani kelapa sawit mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan petani untuk memperoleh berbagai input selama proses produksi berlangsung. Input *tradable* merupakan input yang diperdagangkan secara internasional sehingga memiliki harga pasar internasional, yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan harga sosial pada usahatani kelapa sawit. Menurut Pearson et al. (2005), input yang termasuk dalam kategori *tradable* adalah input yang tergolong sebagai komoditas ekspor maupun impor, dengan harga sosial yang dapat ditentukan berdasarkan harga FOB atau CIF. Sementara itu, input *non tradable* adalah input yang tidak diperdagangkan di pasar internasional. Rincian biaya input *tradable* dan *non tradable* yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Biaya Input Tradable dan Non Tradable Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Pada Tahun 2024

| Input Tradable | Biaya (Rp/ha)      |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|
|                | Biaya Harga Privat | Biaya Harga Sosial |
| NPK            | 372.867            | 317.549            |
| KCL            | 235.333            | 235.111            |
| Gramaxone      | 480.472            | 377.514            |
| Roundup        | 400.000            | 350.000            |
| Jumlah         | 1.488.672          | 1.280.174          |

  

| Input Non Tradable | Biaya (Rp/ha) |              |
|--------------------|---------------|--------------|
|                    | Privat        | Sosial       |
| Bibit              | 6.557.250,00  | 6.557.250,00 |
| Pupuk              |               |              |
| 1. Urea            | 229.400,00    | 229.400,00   |
| 2. NPK             | 248.577,78    | 211.699,31   |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 3. Dolomit        | 10.877,78     | 10.877,78     |
| Peralatan         |               |               |
| 1. Cangkul        | 19.933,33     | 19.933,33     |
| 2. Dodos          | 51.666,67     | 51.666,67     |
| 3. Egrek          | 66.666,67     | 66.666,67     |
| 4. Angkong        | 141.666,67    | 141.666,67    |
| 5. Tojok          | 18.666,67     | 18.666,67     |
| 6. Gancu          | 10.888,89     | 10.888,89     |
| Tenaga Kerja      |               |               |
| 1. Dalam Keluarga | 335.196,14    | 335.196,14    |
| 2. Luar Keluarga  | 2.595.495,44  | 2.595.495,44  |
| Lahan             | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Jumlah            | 50.005.219,37 | 49.968.340,90 |

Sumber : Hasil Olahan Data Primer,2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa total biaya usahatani kelapa sawit rakyat pada harga privat lebih tinggi dibandingkan dengan total biaya pada harga sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan petani menanggung biaya produksi yang lebih besar pada kondisi pasar aktual dibandingkan kondisi tanpa distorsi kebijakan. Perbedaan biaya tersebut terutama bersumber dari input tradable, di mana total biaya input tradable pada harga privat lebih tinggi dibandingkan harga sosial. Hal ini mencerminkan bahwa petani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian membeli input tradable, seperti pupuk dan herbisida, dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga sosialnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya beban kebijakan pada sisi input, yang menyebabkan harga input tradable yang dibayar petani lebih tinggi dari harga ekonomi sebenarnya. Sementara itu, biaya input non tradable pada harga privat relatif sama dengan biaya pada harga sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat distorsi kebijakan pada input non tradable seperti bibit, tenaga kerja, peralatan, dan lahan, sehingga harga yang dibayarkan petani telah mencerminkan biaya ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, perbedaan total biaya antara harga privat dan harga sosial dalam usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian lebih dipengaruhi oleh perbedaan harga pada input tradable.

#### **Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Kelapa Sawit Rakyat**

Output dari kegiatan usahatani kelapa sawit adalah Tandan Buah Segar (TBS). Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata produksi di daerah penelitian yaitu sebesar 1.547,02 ton/ha dengan rata-rata harga jual Rp. 3.700/kg. Adapun besarnya keuntungan usahatani kelapa sawit di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Lokasi Penelitian

| Tahun 2024               |                    |            |            |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| Uraian                   | Keuntungan (Rp/ha) |            | Sosial     |
|                          | Privat             |            |            |
| Penerimaan (TBS)         |                    | 73.598.026 | 62.258.957 |
| Biaya Input Tradable     |                    | 1.488.672  | 1.280.174  |
| Biaya Input Non Tradable |                    | 50.005.219 | 49.968.341 |
| Total Biaya              |                    | 51.493.891 | 51.248.515 |
| Keuntungan               |                    | 22.104.134 | 11.010.442 |

Sumber : Hasil Olahan Data Primer,2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa keuntungan usahatani kelapa sawit pada harga privat sebesar Rp 22,1 juta/ha sedangkan keuntungan pada harga sosial sebesar Rp. 11,01 juta/ha. Keuntungan harga privat lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan harga sosial. Sejalan dengan penelitian (Sianturi et al., 2021), bahwa keuntungan kelapa sawit di Kecamatan Kernan pada harga privat sebesar 42.953.200/ha lebih besar dari keuntungan pada harga sosialnya yaitu sebesar 22.838.066/ha bahwa

penerimaan yang diperoleh petani pada harga privat lebih tinggi dari harga sosialnya dikarenakan adanya distorsi kebijakan pemerintah.

### **Policy Analysis Matrix (PAM)**

Pendekatan PAM (*Policy Analysis Matrix*) yang dikemukakan Monke dan Pearson (1989) dalam (Soetriono, 2017) yang menyatakan bahwa sistem analisis dengan memasukkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi biaya, penerimaan dan keuntungan.

**Tabel 3.** *Policy Analysis Matrix* (PAM) Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Daerah Penelitian Tahun 2024

| Uraian     | Penerimaan    | Biaya (Rp/ha) |               | Keuntungan    |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |               | Tradable      | Non Tradable  |               |
| Privat     | 73.598.025,83 | 1.488.672,00  | 50.005.219,37 | 22.104.134,46 |
| Sosial     | 62.258.957,02 | 1.280.174,00  | 49.968.340,90 | 11.010.442,12 |
| Divergensi | 11.339.068,81 | 208.498,00    | 36.878,47     | 11.093.692,34 |

Sumber : Hasil Olahan Data Primer,2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa baris pertama dari Matrix PAM adalah perhitungan dengan harga pasar (privat), yaitu harga yang dibayarkan oleh petani. Baris kedua merupakan perhitungan yang didasarkan pada harga sosial atau bayangan (*shadow price*), yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial yang sesungguhnya bagi unsur biaya maupun hasil. Dan baris ketiga merupakan perbedaan perhitungan dari harga privat dengan harga sosial sebagai akibat dari dampak kebijaksanaan dari pemerintah. Sejalan dengan penelitian (Sianturi et al., 2021) bahwa selisih keuntungan komoditas kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi pada harga privat dan harga sosial bernilai positif. Dapat dilihat usahatani kelapa sawit menguntungkan secara finansial dan ekonomi dikarenakan keuntungan pada harga privat dan sosial bernilai positif.

### **Analisis Keuntungan Privat dan Keuntungan Sosial Usahatani Kelapa Sawit Rakyat**

Private Profitability (PP) merupakan selisih antara penerimaan dan biaya produksi yang benar-benar diterima atau dibayarkan oleh petani, sehingga mencerminkan tingkat efisiensi finansial suatu komoditas pada kondisi pasar yang berlaku. Sementara itu, Social Profitability (SP) adalah selisih antara penerimaan dan biaya produksi yang dihitung berdasarkan harga sosial. Nilai SP digunakan sebagai indikator efisiensi ekonomi suatu komoditas dalam kondisi tanpa adanya distorsi atau intervensi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis keuntungan usahatani kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Keuntungan Privat dan Keuntungan Sosial Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Daerah Penelitian Tahun 2024

| Indikator              | Nilai (Rp/ha) |
|------------------------|---------------|
| Keuntungan Privat (PP) | 22.104.134    |
| Keuntungan Sosial (SP) | 11.010.442    |

Sumber : Hasil Olahan Data Primer,2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit rakyat memberikan keuntungan privat yang positif dan menguntungkan secara finansial bagi petani. Keuntungan privat yang diperoleh petani dengan adanya kebijakan pemerintah tercatat sebesar Rp22,1 juta per hektar. Sementara itu, keuntungan sosial mencapai Rp31,85 juta per hektar, yang menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi kebijakan pemerintah, usahatani kelapa sawit rakyat tetap menguntungkan secara ekonomi. Nilai keuntungan privat dan sosial yang positif mengindikasikan bahwa komoditas kelapa sawit rakyat memiliki daya saing serta berpotensi untuk terus dikembangkan.

### **Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Rakyat**

Daya saing suatu komoditas sering diukur dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Kedua pendekatan tersebut adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi pengusahaan komoditas. Keuntungan dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif (Setiawati, 2021). Keunggulan komparatif suatu komoditas dapat diidentifikasi melalui nilai

Domestic Resource Cost Ratio (DRCR), sedangkan keunggulan kompetitif dapat dilihat dari nilai Private Cost Ratio (PCR) (Nainggolan et al., 2022). Daya saing usahatani di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Daerah Penelitian Tahun 2024

| Indikator                           | Nilai   | Indikator |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| Private Cost Ratio (PCR)            | 0,13884 | PCR < 1   |
| Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) | 0,16558 | DRCR < 1  |

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2025

Tabel 5 menunjukkan nilai PCR sebesar 0,13884 atau  $PCR < 1$  yang artinya jenis komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif, sebaliknya apabila nilai  $PCR > 1$  yang berarti jenis komoditi yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini menunjukkan untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah output pada harga privat hanya dibutuhkan 13,884% atau setiap satuan rupiah produksi yang dihasilkan akan memberi nilai tambah finansial atau harga privat sebesar 0,86116 rupiah. Hasil tersebut sejalan dengan temuan pada penelitian sebelumnya, (Farita et al., 2021) yang menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit umumnya memiliki daya saing yang kuat, baik secara kompetitif maupun komparatif. Sebagai penguat, penelitian di Kabupaten Kampar juga memperlihatkan bahwa usahatani kelapa sawit mampu memberikan keuntungan finansial dan ekonomi yang signifikan, serta menunjukkan indikator daya saing yang sangat positif. Penelitian tersebut mencatat nilai PCR sebesar 0,11 dan DRCR sebesar 0,31, yang keduanya berada di bawah angka 1. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem produksi kelapa sawit di wilayah tersebut efisien baik menurut harga privat maupun sosial.

Hasil DRCR sebesar 0,16558 atau  $DRCR < 1$  yang menunjukkan bahwa usahatani tersebut memiliki keunggulan komparatif. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu satuan output pada harga sosial hanya membutuhkan sumber daya domestik sebesar 16,558% atau setiap satu satuan rupiah produksi yang dihasilkan akan memberikan nilai tambah secara ekonomi (harga sosial) sebesar 0,83442 rupiah. Sejalan dengan penelitian (Sianturi et al., 2021), yang menyatakan bahwa usahatani kelapa sawit di Kecamatan Skernan memiliki nilai DRCR sebesar 0,2734 ( $DRCR < 1$ ) yang menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit di Kecamatan Skernan efisien dalam penggunaan sumber daya dan memiliki keunggulan komparatif. Berdasarkan nilai indikator PCR dan DRCR yang kurang dari satu ( $PCR < 1$ ) dan ( $DRCR < 1$ ), bahwa usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

#### Hasil Uji Statistik Hipotesis

Pengujian signifikansi daya saing usahatani kelapa sawit rakyat, baik dari aspek keunggulan komparatif maupun kompetitif, dilakukan menggunakan Uji One Sample Test. Hasil perhitungan indikator DRCR dan PCR selanjutnya disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Uji *One Sample Test* PCR dan DRCR Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Tahun 2024

| Indikator Daya Saing | Hasil Uji <i>One Sample Test</i> Sig |
|----------------------|--------------------------------------|
| PCR                  | 0.000                                |
| DRCR                 | 0.000                                |

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2025

Tabel 6 menyajikan hasil analisis Uji One Sample Test terhadap indikator DRCR dan PCR pada usahatani kelapa sawit rakyat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi DRCR dan PCR sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan tersebut, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik seluruh petani kelapa sawit rakyat memiliki daya saing yang signifikan baik dari sisi keunggulan komparatif maupun kompetitif. Dengan demikian, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari memiliki daya saing yang sama, baik berdasarkan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

## Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Kelapa Sawit Rakyat

Dampak kebijakan pemerintah dapat dianalisis menggunakan matriks PAM melalui beberapa indikator, yaitu *Output Transfer* (OT), *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO), *Transfer Input* (TI), *Nominal Protection Coefficient on Tradable Input* (NPCI), *Transfer Factor* (TF), *Effective Protection Coefficient* (EPC), *Net Transfer* (NT), *Profitability Coefficient* (PC), serta *Subsidy Ratio to Producer* (SRP). Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap komoditas kelapa sawit selanjutnya disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Daerah Penelitian Tahun 2024

| Analisis PAM                                           | Nilai         |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Keuntungan Komparatif</b>                           |               |
| Keuntungan Sosial (SP) = $E - (F + G)$                 | 11.010.442,12 |
| Rasio Sumber Daya Domestik (DRCR) = $G / (E - F)$      | 0,82          |
| <b>Keunggulan Kompetitif</b>                           |               |
| Keuntungan Privat (PP) = $A - (B + C)$                 | 22.104.134,46 |
| Rasio Biaya Privat (PCR) = $C / (A - B)$               | 0,69          |
| <b>Dampak Kebijakan</b>                                |               |
| Transfer Output (TO) = $A - E$                         | 11.339.068,81 |
| Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = $A / E$     | 1,18          |
| Transfer Input (TI) = $B - F$                          | 208.498,00    |
| Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) = $B / F$      | 1,16          |
| Transfer Faktor (TF) = $C - G$                         | 36.878,47     |
| Koefisien Proteksi Efektif (EPC) = $(A - B) / (E - F)$ | 1,18          |
| Transfer Bersih (NT) = $D - H$                         | 11.093.692,34 |
| Koefisien Keuntungan (PC) = $D / H$                    | 2,01          |
| Rasio Subsidi Produsen (SRP) = $L / E$                 | 0,18          |

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2025

### Kebijakan Input

Kebijakan input merupakan kebijakan pemerintah terhadap input seperti subsidi atau pajak dan hambatan perdagangan terhadap input usahatani. Hal tersebut bertujuan agar produsen dapat menggunakan sumberdaya secara optimal. Pengaruh pajak pada input *tradable* menyebabkan harga input lebih tinggi sedangkan biaya produksi meningkat sehingga mengurangi pendapatan petani. Besarnya dampak kebijakan pemerintah terhadap input produksi usahatani kelapa sawit di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ditunjukkan oleh nilai Transfer Input (TI), Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI), dan Transfer Faktor (TF).

Berdasarkan hasil analisis, nilai Transfer Input (TI) diperoleh sebesar Rp. 208.498,00. Nilai  $TI > 0$  artinya yaitu adanya transfer dari petani ke produsen input *tradable* (Latifa, 2021). Dengan kata lain, petani kelapa sawit di Kecamatan Mersam membeli input-input produksi lebih mahal dari yang seharusnya. Sebaliknya, nilai TI negatif menunjukkan adanya kebijakan subsidi pemerintah terhadap input *tradable*. Hal ini menguntungkan petani karena menurunkan biaya produksi.

Koefisien proteksi input nominal (NPCI) merupakan rasio antara biaya input *tradable* privat dengan biaya *input tradable* pada harga sosial. Nilai NPCI dalam penelitian ini sebesar 1,16 atau  $NPCI > 1$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada proteksi harga *input tradable*. Dapat dikatakan juga bahwa petani membayar *input tradable* 16% lebih dari biaya yang seharusnya dikeluarkan petani kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan penelitian Jawari (2017), yang mendapatkan hasil nilai NPCI sebesar 1,08 atau  $NPCI > 1$ , menyatakan bahwa keadaan ini menunjukkan bahwa tidak adanya proteksi harga *input tradable* terutama pada pupuk bersubsidi di pasar domestik. Kondisi ini dijelaskan melalui kebijakan pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024, di mana kelapa sawit belum tidak lagi termasuk sebagai komoditas penerima subsidi pupuk. Akibatnya, petani kelapa sawit dalam penelitian ini membeli pupuk dengan harga pasar sehingga harga input privat yang dibayar relatif lebih tinggi dibandingkan harga sosial. Hal ini tercerminkan dari nilai NPCI sebesar 1,16 yang mengindikasikan adanya beban kebijakan pada sisi input usahatani kelapa sawit.

Transfer Faktor (TF) merupakan indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap *input non-tradable* (*faktor domestik*). Dalam penelitian ini TF bernilai Rp.36.878,47. Nilai Transfer Faktor yang bernilai positif tersebut menggambarkan bahwa harga input non tradable yang dikeluarkan pada harga finansial lebih tinggi dibandingkan dengan input non tradable pada harga sosial. Pada pengusaha usahatani kelapa sawit, produsen harus membayar input non tradable lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan, mereka mengalami kerugian sebesar Rp.36.878,47/ha/tahun.

### **Kebijakan Output**

Kebijakan output pemerintah terhadap output usahatani kelapa sawit di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari dilihat dari dua indikator yaitu *Transfer Output* (TO) dan *Nominal Protection Coefficient in Output* (NPCO). Nilai *transfer output* menunjukkan besarnya intensif masyarakat terhadap pelaku ekonomi sedangkan Koefisien Output Nominal (NPCO) digunakan untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai output berdasarkan harga privat dan harga sosial (Manik, 2019).

Nilai *Transfer Output* yang dihasilkan pada usahatani kelapa sawit di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari adalah sebesar Rp. 11.339.068,81/ha, yang mengindikasikan adanya transfer positif dari konsumen kepada petani. Nilai TO yang positif menunjukkan bahwa penerimaan privat yang diterima petani lebih besar daripada penerimaan harga sosial. Sejalan dengan penelitian (Nainggolan et al., 2022), bahwa nilai TO komoditas kentang di Kabupaten Kerinci adalah sebesar Rp. 10.366.859/ha hal tersebut berarti bahwa terdapat transfer dari konsumen terhadap petani pada komoditas kentang di Kabupaten Kerinci. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan Mintra, yang menetapkan mekanisme pembentukan harga TBS melalui indeks “k”, rendemen CPO dan PK, serta harga penjualan CPO dan PK. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan harga kepada perkebunan mitra agar memperoleh harga yang adil dan menguntungkan, serta mengurangi praktik persaingan usaha yang tidak sehat antara perilaku pasar.

*Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) adalah perbandingan antara penerimaan harga privat dengan penerimaan harga sosial. NPCO yang diperoleh di daerah penelitian sebesar 1,18 atau NPCO > 1 menunjukkan bahwa harga TBS yang diterima petani pada tingkat privat lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah melalui penetapan harga TBS telah memberikan perlindungan terhadap output kelapa sawit. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nainggolan et al., 2022), bahwa nilai NPCO di Kabupaten Kerinci sebesar 1,13 atau NPCO > 1 yang menunjukkan adanya proteksi harga output oleh pemerintah.

### **Kebijakan Input-Output**

Analisis kebijakan pemerintah terhadap input-output adalah analisis gabungan antara kebijakan input dan kebijakan output. Dampak kebijakan gabungan tersebut dapat dilihat melalui indikator Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Transfer Bersih (TB), Koefisien Keuntungan (PC) dan Rasio Subsidi Produsen (SRP). Nilai EPC merupakan rasio antara selisih penerimaan dan biaya *input tradable* pada harga privat dengan selisih penerimaan dan biaya *input tradable* pada harga sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Koefisien Proteksi Efektif (EPC) sebesar 1,18 yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah secara keseluruhan masih memberikan perlindungan yang efektif kepada petani kelapa sawit rakyat. Perlindungan tersebut terutama bersumber dari kebijakan output, mengingat pada sisi input petani masih menanggung biaya input tradable yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan harga TBS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 berperan penting dalam menjaga insentif ekonomi petani meskipun dukungan kebijakan input masih terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nainggolan et al., 2022), yang menghasilkan nilai EPC sebesar 1,16 atau EPC > 1.

Transfer Bersih (NT) adalah selisih antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai NT di lokasi penelitian bernilai positif yakni sebesar Rp. 11.093.692,34/ha atau NT > 0. Sejalan dengan penelitian (Nainggolan et al., 2022), diperoleh nilai NT sebesar Rp. 11.745.689/ha atau NT > 0. Mengartikan bahwa kebijakan pemerintah dapat melindungi petani secara efektif.

Koefisien Keuntungan atau *Profitability Coefficient* (PC) adalah perbandingan antara keuntungan bersih privat dengan keuntungan sosial. Nilai PC di daerah penelitian diperoleh sebesar 2,01 atau  $PC > 1$  artinya, keuntungan privatnya lebih besar daripada keuntungan sosialnya. Hal ini berarti bahwa petani tidak mengalami kerugian yang besar, secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen. Berbeda dengan penelitian (Hermayanti et al., 2013), yang memperoleh nilai PC sebesar 0,87 atau  $PC < 1$  yang artinya kebijakan pemerintah merugikan petani karena petani memperoleh keuntungan lebih rendah dari yang seharusnya.

*Subsidy Ratio to Producer* (SRP) adalah perbandingan antara transfer bersih (NT) dengan penerimaan berdasarkan harga sosial. Nilai SRP di daerah penelitian diperoleh sebesar 0,18. Hal ini sejalan dengan penelitian Aprizal et.al. (2013), yang memperoleh nilai SRP sebesar 0,16 artinya bahwa secara umum kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang terjadi memberikan dampak yang menguntungkan bagi produsen, yaitu petani kelapa sawit. Petani menerima manfaat berupa subsidi sehingga biaya produksi yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan opportunity cost produksi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tersebut mampu meningkatkan keuntungan yang diterima petani kelapa sawit sebesar 16 persen.

#### Analisis sensitifitas

Analisis sensitifitas dilakukan dengan tiga simulasi, yaitu : (1) jika harga Input naik 30%, (2) jika harga TBS turun 30%, dan (3) jika harga input naik 30% dan harga TBS turun 30%. Hasil ketiga simulasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8.** Simulasi Analisis Sensitifitas pada Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Daerah Penelitian Tahun 2024

| Simulasi                               | PCR  | DRCR | NPCI | NPCO | EPC  | PC    | SRP  |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Normal                                 | 0,69 | 0,82 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 2,01  | 0,18 |
| Harga Input Naik 30%                   | 0,91 | 1,07 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | -1,53 | 0,18 |
| Harga TBS Turun 30%                    | 1,42 | 1,67 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 0,73  | 0,17 |
| Harga Input Naik 30% dan TBS Turun 30% | 1,31 | 1,55 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 0,67  | 0,17 |

Turun 30%

#### Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2025

Dapat dilihat pada tabel 8 pada simulasi kenaikan harga input sebesar 30 persen, daya saing usahatani kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai PCR meningkat menjadi 0,91, yang berarti untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah pada harga privat diperlukan pengorbanan biaya faktor domestik sebesar 91 persen. Sementara itu, nilai DRCR meningkat menjadi 1,07, yang menunjukkan bahwa secara komparatif usahatani kelapa sawit tidak lagi efisien karena membutuhkan biaya sumber daya domestik yang lebih besar dari satu satuan devisa yang dihemat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga input memberikan tekanan yang cukup besar terhadap efisiensi ekonomi usahatani. Nilai PC yang berubah menjadi negatif (-1,53) mencerminkan bahwa pada kondisi ini, kebijakan yang berlaku justru menurunkan keuntungan yang diterima petani, meskipun nilai SRP masih menunjukkan adanya subsidi relatif terhadap nilai produksi.

Pada simulasi penurunan harga TBS sebesar 30 persen, penurunan daya saing terlihat lebih tajam dibandingkan simulasi kenaikan harga input. Nilai PCR meningkat menjadi 1,42, yang berarti untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah, petani harus mengorbankan biaya faktor domestik yang lebih besar dari nilai tambah yang dihasilkan. Demikian pula nilai DRCR meningkat menjadi 1,67, yang menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit tidak lagi memiliki keunggulan komparatif karena penggunaan sumber daya domestik menjadi tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga output memiliki dampak yang lebih besar terhadap daya saing usahatani dibandingkan kenaikan harga input. Nilai PC sebesar 0,73 dan SRP sebesar 0,17 mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat kebijakan yang mendukung, insentif yang diterima petani menjadi semakin kecil. Pada simulasi kenaikan harga input sebesar 30 persen dan penurunan harga TBS sebesar 30 persen secara bersamaan, daya saing usahatani kelapa sawit berada pada kondisi yang paling tidak menguntungkan. Nilai PCR sebesar 1,31 dan DRCR sebesar 1,55 menunjukkan bahwa baik secara kompetitif maupun komparatif, usahatani kelapa sawit tidak lagi efisien. Kondisi ini mencerminkan bahwa kombinasi kenaikan biaya produksi dan penurunan harga output memberikan tekanan ganda terhadap kinerja

ekonomi usahatani. Meskipun nilai EPC masih menunjukkan adanya perlindungan kebijakan, nilai PC dan SRP yang relatif rendah mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum mampu sepenuhnya melindungi petani dari dampak negatif perubahan harga input dan output.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam rata-rata diusahakan pada lahan seluas 4,18 ha dengan penggunaan bibit unggul serta pupuk Urea, NPK, KCl, dan Dolomit. Namun demikian, tingkat penggunaan pupuk masih berada di bawah dosis anjuran teknis, sehingga pengelolaan input produksi belum optimal dan masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi usahatani. Usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam memiliki daya saing yang baik baik secara kompetitif maupun komparatif. Hasil analisis PAM menunjukkan nilai PCR sebesar 0,69 dan DRCR sebesar 0,82, serta keuntungan privat dan sosial yang bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani kelapa sawit rakyat efisien secara finansial maupun ekonomi dan layak untuk dikembangkan. Dari sisi kebijakan, pemerintah memberikan perlindungan pada sisi output, yang tercermin dari nilai NPCO, EPC, dan TO yang bernilai positif, sehingga harga TBS yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya. Sebaliknya, kebijakan pada sisi input belum memberikan perlindungan yang memadai, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai NPCI sebesar 1,16. Selain itu, hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa daya saing usahatani kelapa sawit rakyat lebih rentan terhadap penurunan harga TBS dibandingkan kenaikan harga input, sehingga stabilitas harga output memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan daya saing. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan peningkatan daya saing usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam lebih ditentukan oleh stabilitas harga output dan perbaikan efisiensi penggunaan input dibandingkan sekadar peningkatan produksi. Oleh karena itu, kebijakan penetapan harga TBS perlu dipertahankan dan diperkuat, sementara dukungan kebijakan pada sisi input, khususnya dalam peningkatan akses petani terhadap pupuk dengan harga terjangkau, menjadi penting untuk mendorong efisiensi dan menjaga daya saing jangka panjang usahatani kelapa sawit rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, I. 2023. *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Anwar, 2024. *Buku Ajar Evaluasi Proyek Pertanian Dilengkapi Aplikasi Program Excel*. Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). Mataram.
- Aprizal, et.al. 2013. *Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko (Studi Kasus Desa Bumi Mulya)*. Jurnal Universitas Bengkulu.
- Farita, N., Tarumun, S., Rifai, A., & Widya, B. (2021). Analisis Daya Saing Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Agribisnis*, 23(1), 73–81.
- Hermayanti, N. W., Abidin, Z., & Santoso, H. (2013). *ANALISIS DAYA SAING USAHATANI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*.
- Jawari, Ani Muani, R. 2017. *Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas*. 6(April), 487–492.
- Kolombo, S. A., Guampe, F. A., Pelima, J. N., Nainggolan, S., Sengadji, H. M., Mone, M. M. K., Medah, M. S., Rihi, M. S. R., Lano, M. L., Bunga, N. I., & Sinlae, M. H. V. (2025). *PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN*. TAHTA MEDIA GROUP.
- Latifa, et al. 2021. *Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia*. Agricultural Journal.
- Manik. 2019. *Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo*. Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomika Bisnis, 22(1), 116–127. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v22i1.8620>
- Nainggolan, S., Yanita, M., & Yumanita, S. (2022). Analisis Daya Saing Usahatani Kentang Dan

- Dampak Kebijakan Pemerintah Di Provinsi Jambi-Indonesia. *Journal Of Agribusiness and Local Wisdom (JALOW)*, Vol. 5 No.1.
- Nainggolan, S., Edison, Fitri, Y., Nurchaini, D. S., & Saputra, A. (2024). *TEORI EKONOMI PRODUKSI* (C. Vidiati & Yati, Eds.; 1st ed.). Tohar Media.
- Pearson, S. Gotsch, C dan Bahri, S. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia. ED.1.* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Setiawati, R. 2016. *Analisis Daya Saing Usahatani Komoditas Padi Sawah Irigasi Kabupaten Tebo*. Fakultas Pertanian. Universitas Jambi.
- Sianturi, E. N., Nainggolan, S., & Elwamendri, E. (2021). Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 24(01), 52–58. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v24i01.13489>
- Soetriono. 2017. *Daya Saing Pertanian dalam Tinjauan Analisis*. Intimemdia Malang. Jakarta Timur
- Sulardi. 2022. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*. PT Dewannga Energi Internasional. Bekasi.